

Analisis Perbandingan Administrasi Negara Myanmar dan Indonesia

Aqila Nadwah Arifah¹, Ervioleta Angelita Sari², Dinda Friska Maulia³, Paulina Ruth Tarigan⁴, Siti Nazwa Nayla divani⁵

naaqila19@gmail.com¹, angelita.sari10@gmail.com², dindafriskamaulia04@gmail.com³, paulinatrgnnn@gmail.com⁴, sitinazwanayla@gmail.com⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa- Indonesia

ABSTRACT

Comparative State Administration is a branch of the discipline of state administration that presents and explains state administration systems using a comparative approach. The comparison of state administration that will be examined in this article is a comparison of the state administration of Indonesia and Myanmar. The research carried out will analyze the state administration carried out in Indonesia along with the state administration carried out in Myanmar. Then, through analysis of the administration of the two countries, patterns of similarities and differences will be found. The research method used in this article is normative juridical, namely research based on norms, concepts, theories and regulations that apply in both countries. In this article, data collected from various literature will be presented in descriptive form. Based on the results of analysis of various sources related to the scope of discussion, researchers found quite large differences between the state administration of Indonesia and Myanmar. The differences between the administrations of these two countries are basically caused by the State of Myanmar, whose government experienced a coup against the government in power so that since then the government has been under the military. So it is quite difficult to examine the state administration of Myanmar because the government system changes according to the political conditions that occur in the country. This is very different from Indonesia, where the government has systematically regulated the government, positions within it, and their authority in the country's constitution, where the government system must run in accordance with the constitution and must not leave it.

Keyword: .State Administration, Comparative, Indonesia, Myanmar

ABSTRAK

Perbandingan Administrasi Negara merupakan cabang disiplin ilmu administrasi negara yang menyajikan dan menjelaskan sistem penyelenggaraan negara menggunakan pendekatan perbandingan. Perbandingan administrasi negara yang akan diteliti dalam artikel ini adalah perbandingan administrasi negara Indonesia dan Myanmar. Penelitian yang dilakukan akan menganalisis administrasi negara yang dijalankan di Indonesia beserta administrasi negara yang dijalankan di Myanmar. Kemudian melalui analisis terhadap penyelenggaraan administrasi kedua negara akan ditemukan pola persamaan dan juga pola perbedaan terhadapnya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian berdasarkan norma, konsep, teori, dan peraturan yang berlaku di kedua negara. Dalam artikel ini, data yang dikumpulkan dari berbagai literatur akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan ruang lingkup pembahasan, peneliti menemukan perbedaan yang cukup besar antara administrasi negara Indonesia dan juga Myanmar. Letak perbedaan antara administrasi kedua negara ini pada dasarnya disebabkan oleh Negara Myanmar yang didalam pemerintahannya mengalami kudeta terhadap pemerintah yang berkuasa sehingga semenjak saat itu pemerintahanan dibawah militer. Sehingga cukup sulit untuk menelaah administrrasi negara Myanmar dikarenakan sistem pemerintahan yang berganti-gantian sesuai dengan kondisi politik yang terjadi di negara tersebut. Berbeda jauh dengan Indonesia yang dalam pemerintahannya sudah diatur secara sistematis terkait pemerintahan, jabatan didalamnya, beserta kewenangannya dalam konstitusi negara yang mana sistem pemerintahan tersebut harus berjalan sesuai konstitusi dan tidak boleh keluar dari sana.

Kata Kunci: Administrasi Negara, Perbandingan, Indonesia, Myanmar

Pendahuluan

Administrasi Negara pada dasarnya merupakan ilmu yang pembahasannya memusatkan pada aspek penyelenggaraan kenegaraan dalam rangka mencapai suatu tujuan negara. Beberapa ahli seperti Fred W, Paul H. Appleby, dan lainnya berpendapat bahwa ilmu administrasi negara dapat menjadi satu kesatuan disiplin yang utuh apabila berbasis pada perbandingan didalam kajian ilmunya. Sesuai dengan pendapat ahli bahwa keseluruhan ilmu politik maupun administrasi negara membutuhkan kajian analisis perbandingan untuk menemukan hubungan sebab akibat dan mencapai suatu prediktabilitas (Riggs, 2022). Menurut Riggs via Heady (1962:4) "*comparative study of administration is the theory of public administration as applied in differse cultures and national settings*". Artinya, Kajian Perbandingan Administrasi adalah suatu teori Administrasi Publik sebagaimana diimplementasikan dalam tatanan budaya dan nasional yang beragam.¹ Perbedaan administrasi negara disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi politik, sosial, dan juga budaya yang berkembang seiring perjalanan waktu. Maka dari itu, negara yang satu dan yang lainnya mempunyai sistem administrasi negara yang berbeda-beda.² Dalam menganalisis perbandingan administrasi negara berarti mengkaji sistem pemerintahan antar 2 negara yang memiliki latar kebudayaan yang berbeda-beda dan tentunya model pemerintahan yang berbeda juga. Serta melalui studi perbandingan akan ditelaah sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga serta jabatan-jabatan yang ada di dalamnya.³

Indonesia dan Myanmar merupakan 2 negara yang memiliki persamaan dalam hal letak geografis yakni, sama-sama terletak di Asia Tenggara. Dalam menjalankan pemerintahannya pun, Indonesia dan Myanmar pernah beberapa kali menjalin suatu kerjasama, mengingat kedua negara ini merupakan anggota dari ASEAN. Walaupun ditemukan unsur kesamaan antara kedua negara ini, tentunya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan belum tentu sama karena pemerintahan harus dijalankan berdasarkan kebudayaan dan kondisi sosial yang tumbuh dalam masyarakat di negara tersebut. Untuk itu rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah

1. Bagaimana Perbandingan Administrasi Negara antara Indonesia dan Myanmar?
2. Bagaimanakah Pola Persamaan dan juga Perbedaan antara Administrasi Negara Indonesia dan Myanmar?

¹ Ari Kusumah, *Memahami Administrasi Negara melalui Perspektif Perbandingan*, Vol 4 No 4, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 2023, hal.590.

² Handika.D.A.Pelu,dkk, PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIANUT OLEH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN, Vol.10 No.1, Jurnal Cahaya Keadilan, 2022, hal.22.

³ Anisa Syifa Maulida, dkk. *Analisis Perbandingan Administrasi Publik Negara Inggris dan Australia*, Vol 1 No.2, PENTAHHELIX: Jurnal Administrasi Publik, 2023, hal.164.

Berlandaskan pengertian dari perbandingan administrasi negara yang diuraikan pada paragraf sebelumnya maka perbandingan yang dilakukan melalui artikel ini akan berpatokan pada analisis sistem pemerintahan, unsur-unsur kelembagaan, serta setiap atribut pemerintahannya yang dijalankan, baik itu di Negara Indonesia maupun Negara Myanmar.

Metode Penelitian

Penelitian secara yuridis normatif artinya penelitian dilakukan berdasarkan norma, konsep, teori, dan peraturan perundang-undangan. Melalui metode ini akan dijelaskan perbandingan administrasi kedua negara berdasarkan hukum nasional yang berlaku baik di Indonesia maupun Myanmar.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka atau *internet searching*. Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan teknik menganalisis dan menelaah berbagai literatur serta teori-teori yang relevan terhadap masalah yang dibahas.⁴ Data yang digunakan dalam kepenulisan ini berupa bahan hukum primer, yakni peraturan-peraturan yang berlaku saat ini baik di Indonesia maupun di Myanmar. Kemudian bahan hukum sekunder berupa buku-buku rujukan, artikel, hasil karya tulis ilmiah, dan juga jurnal yang relevan terhadap topik yang dikaji. Selain itu, bahan hukum tersier juga diperlukan sebagai petunjuk dalam memahami bahan hukum primer dan juga sekunder.

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data penelitian secara sistematis, untuk dapat meningkatkan pemahaman terhadap masalah yang dibahas.⁵ Metode analisis dalam artikel ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data hasil temuan akan digambarkan dalam bentuk deskriptif berdasarkan hasil analisis kualitatif terhadap data-data yang telah dikumpulkan terkait perbandingan administrasi negara Indonesia dan Myanmar.

Hasil dan pembahasan

Dalam proses kenegaraan diperlukan susunan tujuan kenegaraan. Maka dari itu diperlukan suatu kewenangan dan juga lembaga-lembaga negara yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Disinilah administrasi negara berperan.⁶

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang berkaitan dengan lingkup pembahasan, ditemukan perbedaan yang cukup besar antara Myanmar dan Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Perbedaan ini disebabkan oleh kudeta dan perbedaan kubu yang dialami oleh Myanmar dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Berbeda dengan Indonesia, pemerintahannya berjalan sesuai dengan konstitusi yang menetapkan hukum-hukum terhadap setiap tindakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan tujuan nasional yang sudah ditetapkan dalam konstitusi negara. Namun masih ditemukan sejumlah

⁴ Miza Nini Adlina, dkk, *METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA*, Vol 6 No 1, Jurnal Edumaspul, 2022, hal. 975.

⁵ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Vol 17 No 33, Jurnal Alhadharah, 2018, hal.85.

⁶ Abdur Rahim, dkk, *Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia*, Vol 6 No.8, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 2023, hal. 5806.

pola persamaan dalam administrasi negara Indonesia dan Myanmar, walaupun persamaan tersebut dalam pelaksanaannya baik di Myanmar maupun di Indonesia sangat bertolak belakang.

1.1 Administrasi Negara Indonesia dan Myanmar

Administrasi Negara Indonesia

Sistem administrasi negara merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah kecuali dua hal, yaitu pembuatan undang-undang dan keputusan. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintahannya adalah republik, dengan kekuasaan eksekutif dipegang langsung oleh presiden sebagai kepala negara beserta jajarannya. Kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR dan DPD, juga yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung.

Membahas terkait administrasi negara di Indonesia, maka tidak akan jauh dari kata Pancasila dan UUD 1945 yang berlaku sebagai nilai-nilai yang fundamental. Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Maka jika diurutkan, konsep hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 terdiri atas:⁷

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Pemerintah Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, penyelenggaraan tugas umum pemerintah didasarkan pada Sistem Negara Republik Indonesia (SANRI) yang mana merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. SANRI, dalam operasionalnya didasarkan pada GBHN dan kebijakan lainnya. Seiring dengan perubahan dan perkembangan berbagai faktor, SANRI terus berkembang dalam hal tugas dan fungsi pemerintahan menyesuaikan perkembangan.

Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa SANRI merupakan keterkaitan/kerjasama setiap bagian-bagian dari pemerintahan di Indonesia, yang mana ditujukan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mencapai negara yang adil dan makmur. Peranan sistem administrasi negara republik Indonesia adalah untuk:

- Mewujudkan kebijakan pemerintah dalam pelayanan publik
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
- Menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik

⁷ Muliati, *Administrasi Negara dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Vol 2 No.1, Meraja Journal, 2019, hal.84.

- Meningkatkan akuntabilitas dan transportasi pemerintah

Struktur sistem administrasi negara republik Indonesia terdiri dari tiga tingkatan, yaitu:

- Pusat: Presiden dan wakil presiden
- Daerah: pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipimpin oleh gubernur dan bupati/walikota
- Desa/Kelurahan: Kepala desa/lurah

Komponen sistem administrasi negara republik Indonesia terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- Kebijakan publik, yaitu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
- Sumber daya manusia, pegawai yang bekerja untuk pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi
- Anggaran, sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan administrasi negara
- Teknologi informasi, alat dan sistem informasi yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi negara

Prinsip sistem administrasi negara republik Indonesia meliputi: kepentingan nasional, demokrasi, kepemimpinan, keterbukaan, kemandirian dan kecukupan, efisiensi dan efektivitas, kepastian hukum, dan hak asasi manusia.

Terdapat pula tantangan dalam sistem administrasi negara republik Indonesia, antara lain:

- Korupsi: praktik yang merugikan keuangan negara dan menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
- Birokrasi yang lambat dan tidak efisien: proses birokrasi yang panjang dan rumit menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
- Teknologi yang kurang memadai: teknologi informasi yang belum memadai menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

Struktur, fungsi, prinsip dan tantangan sistem negara republik Indonesia harus dipahami dan dikelola dengan baik agar tujuan dan perannya dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Terdapat tiga konsep utama dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di Indonesia:

1. *Good governance*, yaitu sebuah konsep yang mengacu pada cara-cara tata kelola yang baik dan benar dalam mengelola sebuah organisasi, ciri-cirinya adalah; partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan responsif.
2. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan publik, tujuannya adalah mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan mengurangi korupsi dan nepotisme.

3. Desentralisasi adalah suatu sistem yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah.⁸

Landasan kerangka administrasi sebagai sistem administrasi negara Indonesia terdiri atas:

- a. Pancasila
- b. Landasan Konstitusional
- c. Landasan operasional:

Dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan baik pusat maupun daerah harus sesuai dengan sistem administrasi negara Indonesia. Hal tersebut tentunya untuk menjaga dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terjadi kesewenang-wenangan, dan dalam menentukan kebijakan lebih terarah yaitu dalam arah mencapai tujuan nasional.

Administrasi Negara Myanmar

Sistem administrasi negara menurut Prof. Fred W. Riggs adalah suatu tatanan institusi dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Sistem ini melibatkan berbagai organ pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Myanmar merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara yang memiliki keanekaragaman budaya dengan pengaruh dari berbagai etnis, baik etnis bamar, karen, shan, dan sebagainya.

Sistem administrasi negara Myanmar berpusat pada pemerintahan otoriter yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan dan kontrol sepenuhnya terpusat pada pemimpin atau pihak yang memiliki otoritas tertinggi.⁹ Ketika Myanmar baru saja merdeka, Myanmar menjalankan sistem pemerintahan parlementer dibawah pemerintahan U Nu. Strategi nasional pada saat itu yakni Pydawtha (Negara yang Makmur). Namun sayangnya, kelompok militer menganggap pemerintahan sipil U Nu tidak mampu menata negara Myanmar. Hingga akhirnya pada tahun 1962 terjadi kudeta oleh kelompok militer dan menjadi awal dari keruntuhan demokrasi di Myanmar.¹⁰

Sebelum dimulainya reformasi politik pada tahun 2011, Myanmar diperintah oleh rezim militer yang keras dan otoriter sejak kudeta yang dilakukan pada tahun 1962. Pada tahun 2011, pemerintah militer berusaha melakukan reformasi politik dengan memperkenalkan langkah-langkah menuju demokrasi.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah menuju pembukaan politik dan reformasi tidak berjalan dengan mulus, institusi militer memiliki pengaruh yang kuat dalam sistem administrasi negara Myanmar. Konstitusi negara Myanmar yang diamandemen pada tahun 2008

⁸ Dakota Ilmu (2023, 5 April). *Sistem Administrasi Negara Indonesia* [Video]. Youtube. Diakses dari <https://youtu.be/OkCeqGyPA9o?si=uwiY3vJj1bOpg5NX>.

⁹ Ismail Nurdin. *Etika pemerintahan*. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books: 2017), hal.35.

¹⁰ M. Adian Firnas, *Prospek Demokrasi di Myanmar*, Vol 2 No.2, Jurnal Paramadina, 2003, hal.129-130.

memberikan kuasa yang signifikan kepada militer, termasuk kuota kursi yang ditentukan untuk militer di parlemen dan kontrol atas Kementerian-Kementerian inti, seperti pertahanan, dalam negeri, dan urusan perbatasan. Proses kenegaraan yang dilewati oleh Myanmar tidaklah mulus, ada banyak gejolak yang harus dihadapi oleh Myanmar semenjak negara tersebut merdeka pada tahun 1948.¹¹

Usaha pemerintah dalam memperkenalkan demokrasi berhasil, pada tahun 2015 tepatnya pada tanggal 8 November, Myanmar mengadakan pemilihan umum yang rutin dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum pada tahun ini merupakan pemilu umum multipartai pertama yang diadakan Myanmar sejak 1990. Pada tahun ini yang terpilih menjadi presiden berasal dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau yang bisa disebut dengan NLD, partai ini dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Pemilihan umum pada tahun ini merupakan langkah menuju demokrasi yang lebih besar di Myanmar. Pemilihan umum tahun 2015 menjadikan Aung San Suu Kyi sebagai perdana Menteri yang dilantik pada tanggal 6 April 2016 dan berhasil meraih penghargaan nobel di bidang perdamaian pada tahun 1991 atas perjuangannya untuk memperoleh kemerdekaan negara Myanmar yang dijajah oleh kolonial Britania.

Pada pemilihan umum tahun 2020 Partai Liga Nasional atau yang dikenal dengan NLD berhasil memenangkan kembali pesta demokrasi tersebut, akan tetapi tidak berselang lama Pada tanggal 1 Februari 2021, Myanmar mengalami kudeta militer yang pada akhirnya menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.¹² Pengkudetaan yang dilakukan kemudian pemerintahan diambil alih dan berada di bawah kendali militer yang dikenal sebagai Tatmadaw.

Pemerintahan Myanmar dikudeta kemudian diambil alih oleh militer dengan panglima tertinggi Militer Jenderal Min Aung Hlaing sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya. Panglima tertinggi Angkatan bersenjata Myanmar menjadi pemimpin dalam kudeta tersebut dan Jenderal Min Aung Hlaing mengambil alih dewan administrasi negara tersebut.

Negara Myanmar saat ini berpusat pada struktur pemerintahan yang campuran antara elemen-elemen demokratis dan pengaruh kuat dari militer. Berikut gambaran umum mengenai elemen-elemen tersebut :

1. Kepala negara (Presiden) ialah yang memiliki jabatan tertinggi dalam suatu negara dipilih oleh majelis tinggi yang terdiri oleh dua dewan, yaitu dewan perwakilan rakyat dan dewan negara. Namun demikian, peran presiden terbatas karena konstitusi negara Myanmar mengatur terkait pengaruh militer yang besar terhadap konstitusi.

¹¹ Firdaus Muhamad Iqbal & Indah Dwiprigitaningtias , *Kudeta Militer Myanmar dalam Perspektif Hukum Internasional*, Vol 3 No.1, Jurnal Dialektika Hukum, 2021, hal.116.

¹² Alvela dkk, *Dampak Prinsip-Prinsip Dasar ASEAN Terhadap Pola Kerjasama ASEAN Menghadapi Krisis Kudeta Myanmar*, Vol 4 No.1, Nation State: Journal of International Studies, 2021, hal.132.

2. Pemerintahan Myanmar terdiri dari berbagai Kementerian dan badan pemerintah yang bertanggung jawab atas berbagai sektor dan bidang pemerintahan, Kementerian tersebut dipimpin oleh Menteri yang ditunjuk oleh presiden.
3. Negara Myanmar memiliki angkatan bersenjata bernama (Tatmadaw) yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik dan pemerintahan. Konstitusi Myanmar memberikan kuota kursi tetap bagi militer di parlemen, memberikan mereka kendali langsung atas beberapa kementerian inti, serta memberikan hak veto terhadap perubahan konstitusi.
4. Pemilihan umum yang dilaksanakan di Myanmar untuk memilih anggota parlemen dan pemerintahan lokal sering sekali dikeluhkan karena adanya kecurangan dan keterlibatan militer dalam proses politik.
5. Otonomi regional negara Myanmar terdiri dari beberapa negara bagian dan wilayah otonom yang memiliki pemerintahan sendiri. Beberapa wilayah tersebut mengalami konflik bersenjata antara pemerintah pusat dan kelompok etnis bersenjata yang berjuang untuk otonomi atau kemerdekaan.
6. Sistem hukum di negara Myanmar mencakup berbagai peraturan dan lembaga hukum yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi negara tersebut. Akan tetapi independensi sistem hukum sering kali dipertanyakan.

Sistem administrasi yang dimiliki negara Myanmar dapat dikatakan unik dan memiliki ciri khas tersendiri yang berasal dari sejarah negara Myanmar, politik, budaya, dan sosial negara Myanmar. Berikut gambaran umum mengenai sistem administrasi negara Myanmar :

1. Sistem Semi-Otoriter : Meskipun negara Myanmar sudah berupaya menuju reformasi tetapi pengaruh militer dalam sistem pemerintahannya sangat kuat dan besar
2. Sistem Pemerintahan Sentralistik : Pemerintahan pusat negara Myanmar yang terletak di Naypyidaw memiliki kontrol yang kuat.
3. Sistem Birokrasi yang Kompleks : Departemen dan pemerintahan Myanmar yang bertanggung jawab atas pemerintahan dan pembangunan sering kali lambat dalam pengambilan suatu Keputusan.
4. Pemerintahan Lokal : Negara Myanmar terbagi menjadi beberapa wilayah dan bagian, tetapi dengan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadikan kekuatan pemerintahan lokal terbatas.
5. Hubungan dengan Etnis Minoritas : Beragamnya kelompok minoritas di Myanmar dan hubungan pemerintahan pusat yang tidak baik menyebabkan sering terjadinya konflik di beberapa wilayah.
6. Kepemimpinan Militer : Peran militer negara Myanmar sangat kuat dan memiliki kendali dalam sektor keamanan dan keputusan politik serta ekonomi.
7. Proses Politik : Sebelum terjadinya kudeta, Myanmar mengalami reformasi yang lebih baik menuju demokrasi. Akan tetapi, kudeta yang

terjadi di Myanmar mengganggu proses tersebut dan kembalinya pemerintahan militer.

Pada saat ini, meskipun terdapat beberapa langkah nyata menuju reformasi tetapi situasi politik di Myanmar tetap kompleks dan penuh tantangan. Konflik bersenjata di beberapa wilayah terutama dengan kelompok-kelompok etnis bersenjata, serta isu-isu hak asasi manusia, termasuk perlakuan terhadap minoritas etnis yang menjadi perhatian utama dalam administrasi negara Myanmar.

1.2 Persamaan dan Perbedaan antara Administrasi Negara Indonesia dan Myanmar

Persamaan antara Administrasi Negara Indonesia dan Myanmar

Istilah administrasi berkaitan pada aktivitas kerjasama yang dilaksanakan manusia atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kerjasama merupakan kumpulan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dengan bersama, tertib dan tersusun berdasar pembagian tanggung jawab sesuai pada keputusan bersama pada dasarnya administrasi terdiri dari dimensi karakteristik dan dimensi unsur-unsur yang sesuai pada administrasi. Istilah lain administrasi terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pergerakan dan pengawasan. Sebelum memastikan persamaan dari administrasi dari setiap negara harus mengetahui pentingnya konsep perbandingan administrasi negara.

Perbandingan dalam administrasi negara dapat didefinisikan melalui tiga konsep utama, yaitu perbandingan, administrasi, dan negara. Perbandingan merujuk pada evaluasi atau perbandingan antara dua entitas yang serupa terhadap suatu objek atau perbandingan dan perbedaan antara dua objek atau lebih. Administrasi mengacu pada proses pengorganisasian tanggung jawab dan aktivitas dari berbagai tingkat dan jenis pekerjaan secara sistematis dalam sebuah organisasi.

Administrasi negara merujuk pada penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan untuk menggunakan sumber daya dan kekuatan dari aparatur negara guna mencapai tujuan dan melaksanakan tugas negara. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk membandingkan pola administrasi dari berbagai sudut pandang, termasuk institusi-institusi dalam penyelenggaraan negara serta unsur-unsur budaya yang memengaruhi pola penyelenggaraan negara tersebut. Penelitian perbandingan administrasi negara juga mencakup lembaga-lembaga negara yang beroperasi dalam sistem administrasi yang berbeda-beda dan mungkin memiliki kesamaan tertentu, seperti yang terjadi pada kasus Rohingya di Myanmar.

Indonesia dan Myanmar memiliki persamaan dalam kehidupan kenegaraan yang diadakan oleh kedua negara tersebut. Myanmar dan Indonesia sama-sama merupakan negara yang berbentuk republik.¹³

¹³M. Aris Yusuf, Bentuk Pemerintahan Myanmar Hingga Destinasi Wisata-Nya!, <https://www.gramedia.com/literasi/oligarki/>, diakses pada tanggal 21 April 2023.

Negara republik maknanya wakil rakyat dipimpin oleh rakyat dan jabatannya dibatasi oleh batas waktu tertentu berdasarkan ketentuan yang diatur oleh konstitusi masing-masing negara. Di Indonesia sendiri, wakil rakyatnya dibatasi dalam batas 5 tahun dan maksimal 2 periode. Namun di Myanmar, gambaran suatu negara republik tidaklah terlihat oleh karena kepemimpinan yang sekarang dijalankan dengan junta militer dan campuran presiden. Sehingga persamaan antara kedua negara republik ini pada kenyataannya tidak memiliki persamaan dalam proses pengimplementasian sistem republik tersebut.

Persamaan selanjutnya, Myanmar dan Indonesia sama-sama dipimpin oleh presiden. Namun sebagaimana sudah disebutkan, sistem pemerintahan Myanmar setelah terjadinya kudeta menjadikan presiden bukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Angkatan militer Myanmar bahkan menangkap presiden Myanmar dan sejumlah tokoh partai. Sehingga kekuasaan yang dimiliki oleh presiden Myanmar sejatinya tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat di negaranya berbeda dengan Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber, persamaan antara Indonesia dan Myanmar cukup sulit ditemukan. Hal ini karena Myanmar mengalami berbagai konflik yang mengiringi perjalanan politik negaranya. Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kudeta yang dilakukan terhadap presiden oleh junta militer telah melanggar konstitusi negara Myanmar.¹⁴ Sementara itu Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang segala sesuatu harus berjalan dengan konstitusi dan didalamnya tidak mengatur terkait pemberian kursi terhadap militer didalam pemerintahan.

Selain kudeta yang dilakukan terhadap Myanmar, kondisi pemerintahan Myanmar semakin memanas ketika terjadi konflik Rohingya. Sejarawan Myanmar menyatakan bahwa istilah Rohingya mulai populer pada tahun 1950-an, setelah Myanmar merdeka. Masyarakat Muslim di wilayah Arakan, Rakhine, diidentifikasi sebagai Rohingya dalam dokumen PBB. Bahasa yang diharapkan menjadi bahasa Rohingya memiliki akar linguistik yang berbeda dengan bahasa Myanmar, berasal dari keluarga bahasa Indo-Arya, berbeda dengan keluarga bahasa Indo-Eropa yang dominan di Myanmar. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok etnis Rohingya memiliki keterkaitan dengan etnis Bengali di wilayah Chittagong, Bangladesh. Masalah Rohingya tidak terlepas dari politik Myanmar, di mana perubahan pemerintahan telah mempengaruhi status dan perlakuan terhadap Rohingya.

Konflik Rohingya bukan hanya menjadi masalah internal Myanmar, tetapi juga memiliki dampak luas di tingkat regional, mempengaruhi keamanan dan stabilitas negara-negara tetangga. Upaya penyelesaian konflik ini menjadi perhatian tidak hanya bagi ASEAN tetapi juga sektor swasta dan lembaga internasional lainnya yang memperhatikan hak asasi manusia. Meskipun demikian, ada tantangan besar dalam mengatasi

¹⁴Utami Argawati, Sistem Peradilan Myanmar Pasca Kudeta, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18856>, diakses pada 20 April 2024

ketidakadilan yang berkaitan dengan ideologi, etnis, gender, budaya, dan agama, serta penyalahgunaan hak asasi manusia yang sering dilaporkan dalam masyarakat.

Pemerintah Indonesia, melalui pernyataan Mary Natalegawa, menegaskan komitmennya untuk mengangkat isu-isu ini, termasuk masalah Rohingya di Myanmar. Indonesia telah mengutuk berbagai jenis diskriminasi berdasarkan ras, agama, dan faktor lainnya. Upaya negosiasi bilateral dan multilateral dilakukan dengan Myanmar. RI, sebagai mayoritas muslim, menyoroti pentingnya perlindungan minoritas Rohingya berdasarkan niat kemanusiaan dan prinsip universal.

Indonesia juga berkontribusi dalam perlindungan hak asasi manusia dan pemberdayaan etnis Rohingya, mengingat kejahatan yang terjadi di Myanmar. Meskipun konflik ini lebih terkait dengan perbedaan etnis daripada agama, Indonesia merasa kewajiban emosional untuk membantu Rohingya, sesuai dengan komitmennya pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Perbedaan antara Administrasi Negara Indonesia dan Myanmar

Administrasi negara Indonesia dengan Myanmar sangatlah terlihat memiliki perbedaan, dimana Indonesia adalah negara republik dan Myanmar dikuasai oleh junta militer. Perbedaan tersebut terlihat pada bentuk pemerintahan, sistem politiknya, peran pemerintahan, kebijakan publik, hubungan internasional, kebijakan pemerintah hingga dalam hal mengatur perekonomian dan keuangannya.

Perbedaan pertama terletak pada bentuk Pemerintahan dimana Myanmar adalah negara dengan Junta sebagai pemegang posisi kepala negara yang dipimpin oleh Jendral dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sebaliknya, Indonesia adalah negara republik yang memiliki sistem pemerintahan presidensial yang dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.

Selain itu, perbedaan kedua terletak pada sistem Politiknya, dimana Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang lebih demokratis dengan mempertahankan kebebasan politik dan hak asasi manusia dengan cara adanya pemilihan umum untuk memilih pemimpin negara hal ini menjadi salah satu cara dalam meningkatkan dan mewujudkan hak asasi manusia.¹⁵ Sementara di sisi lain, Myanmar memiliki sistem politik yang kurang demokratis di mana militer memainkan peran yang terlihat signifikan dalam pemerintahan dengan pemerintahan militer yang memegang kekuatan untuk menjalankan pemerintahan.

Selanjutnya hal ini juga berkaitan dengan hubungan Internasional antar negara. Karena politiknya yang tidak stabil, maka negara Myanmar memiliki hubungan internasional yang tidak lebih baik daripada Indonesia. Selain itu, Indonesia menjadi lebih aktif dalam hubungan Internasional

¹⁵ Totok Minto Laksono & Florensia Devina, *Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan Sistem Administrasi Negara China*, Vol.8 No.6, Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan, 2024, hal.58.

dengan beberapa negara ASEAN.¹⁶ Salah satu contohnya adalah forum yang didirikan untuk membahas masalah kemanusiaan di Myanmar setelah terjadinya peristiwa kudeta militer. Namun, hubungan internasional negara Myanmar yang kurang dikarenakan kekuasaan militer dan kurangnya pemerintah yang demokratis. Hubungan Myanmar dan Indonesia berbeda dalam hal ini, sebab Indonesia lebih demokratis dan lebih terbuka, sedangkan Myanmar memiliki sistem pemerintahan dengan campur tangan militernya yang memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mengatur negara dan menjadikannya lebih konsolidasi.

Selain itu, ada perbedaan dalam kebijakan pemerintahan masing-masing negara. Sistem pemerintahan Indonesia lebih demokratis, lebih tertata dan terorganisir dibandingkan dengan Myanmar, dengan sistem Trias Politika. Myanmar memiliki sistem pemerintahan yang lebih terpengaruh oleh militer yang memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menjalankan pemerintahan yang tidak demokratis dibandingkan dengan Indonesia yang republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden dipilih secara langsung untuk menjalankan pemerintahan dengan masa jabatannya lima tahun.

Terakhir yaitu berkaitan tentang hal ekonomi dan keuangan pada masing-masing negara. Dengan adanya konflik yang berkelanjutan di negara Myanmar hal itu membuat dampak pada perekonomian dan keuangan yang mengalami kontraksi hal tersebut mengharuskan negara Myanmar fokus terhadap perluasan sumber daya keuangan dengan cara manajemen keuangan publik. Banyak hal yang dilakukan antara negara Myanmar dan Indonesia, contohnya seperti melakukan investasi dan perdagangan dengan tenaga kerja yang dimiliki masing - masing negara memiliki tenaga kerja yang berbeda, dengan Myanmar yang memiliki tenaga kerja 75,66 persen, sedangkan Indonesia memiliki 43,60 persen tenaga kerja yang bekerja di sektor jasa.¹⁷ Selain itu, Myanmar memajukan ekonominya dengan macam-macam komoditas dengan cara melakukan ekspor impor dan berinvestasi. Sedangkan Indonesia melakukan impor dari negara Myanmar dengan macam-macam komoditas seperti sayuran, produk pertanian dan hewani, bahkan produk pakaian dan produk tembaga.

Penutup

Jika dibandingkan antara administrasi negara Indonesia dan Myanmar, Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik yang berpatokan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan penyelenggaraan administrasi negaranya. Pancasila berperan sebagai landasan idiil yang mengandung norma dasar bagi setiap kebijakan pemerintah. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional berperan sebagai alat untuk membatasi kekuasaan pemerintahan

¹⁶ Djirimu MA., AD Tombolotutu., dan Yunus Sading, *PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA INDONESIA DI ASEAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING*, Vol.4 No.3, Kajian Ekonomi dan Keuangan, 2020, hal. 200.

¹⁷ Nadia Feby Artharini, *PERBANDINGAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT NEGARA MYANMAR DENGAN INDONESIA*, Vol.5 No.2, Tanjungpura Law Journal, 2021, hal. 217.

agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Struktur sistem administrasi negara republik Indonesia terdiri dari tiga tingkatan, yaitu: (1) Pemerintahan pusat yang terdiri atas Presiden dan wakil Presiden, dimana dalam hal ini presiden dibantu oleh menteri-menteri yang memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kementeriannya. (2) Kemudian di tingkat daerah, terdiri atas pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipimpin oleh gubernur dan bupati/walikota. (3) Kemudian di tingkat administratif paling bawah terdapat pemerintah desa/kelurahan yang dipimpin oleh kepala desa/lurah.

Kemudian beralih kepada administrasi negara yang dijalankan oleh Myanmar. Sama seperti Indonesia, Myanmar juga memiliki konstitusi sebagai landasan bagi penyelenggaraan negara yakni "Konstitusi Myanmar 2008". Dalam konstitusi ini diatur terkait sistem penyelenggaraan negara, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat administratif yang paling kecil. Ketika kudeta menghampiri negara Myanmar, pemerintahan dijalankan oleh militer yang tidak didasari oleh konstitusi yang jelas. Rezim militer Myanmar membentuk badan-badan dan lembaga khusus serta jabatan-jabatan baru yang diklaim berdasarkan Konstitusi Myanmar 2008 padahal hal tersebut tidak diatur dalam Konstitusi Myanmar 2008. Konstitusi ini memang pada dasarnya memberi kekuasaan yang besar terhadap militer dalam pemerintahan, hal inilah yang menyebabkan militer Myanmar dapat melakukan kudeta dengan dalih kecurangan pemilu.

Jika berdasarkan "Konstitusi Myanmar 2008", dalam penyelenggaraan negaranya, ditemukan beberapa persamaan antara Indonesia dan juga Myanmar. Indonesia dan Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang sama-sama memiliki presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahannya. Myanmar dan juga Indonesia memberikan hak otonom bagi daerah-daerah bagian untuk mengurus wilayahnya sendiri. Dimana jabatan-jabatan ini diberikan mandat selama 5 tahun, yang dipilih melalui pemilihan. Negara ini juga sama-sama memiliki pengadilan konstitusi sebagai pengadilan yang bertugas menafsirkan "apakah setiap peraturan sudah sesuai dengan konstitusi atau belum?" namun pada tahun 2012 terjadi pemakdzulan terhadap lembaga pengadilan konstitusi Myanmar sehingga keputusan konstitusi yang final dan mengikat, hanya bersifat deklaratif dan harus ditinjau kembali oleh legislatif.

Kemudian perbedaan antara administrasi Myanmar dan Indonesia akan dipaparkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Perbedaan Administrasi Negara Indonesia dan Myanmar

	Indonesia	Myanmar
Konstitusi	UUD 1945	Konstitusi Myanmar 2008
Eksekutif	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Presiden dan 1 Wakil Presiden 2. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat 3. Presiden memiliki wewenang untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Presiden dan 2 Wakil Presiden (salah satu jabatannya harus dipegang oleh militer) 2. Presiden dan wakil presiden dipilih berdasarkan anggota Parlemen Persatuan Bikameral

	<p>menunjuk Menteri dalam kabinetnya</p> <p>4. Presiden merupakan panglima tertinggi yang memegang kendali atas angkatan militer Indonesia</p>	<p>3. Presiden berwenang menunjuk menteri-menterinya sendiri namun menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri perbatasan ditunjuk oleh panglima dan berada dibawah kekuasaan militer (konstitusi mengatur pemisahan kekuasaan antara presiden dan panglima</p> <p>4. Presiden bukanlah panglima tertinggi, posisi ini dimiliki oleh militer sehingga dapat menggantikan posisi presiden dalam keadaan darurat</p>
Sistem Politik	Suprastruktur Politik (terdapat lembaga atau organ negara yang menjalankan fungsinya dalam negara) ¹⁸	Infrastruktur Politik (sejatinya Myanmar termasuk dalam suprastruktur politik namun sistem pemerintahan Myanmar memberikan kekuasaan yang besar terhadap kekuasaan sosial politik, dalam hal ini adalah angkatan bersenjata)
Legislatif	Anggota legislatif dipilih oleh masyarakat melalui pemilu	75 persen anggota legislatif diisi oleh militer dan dipilih oleh panglima tertinggi. Anggota badan legislatif dapat mempunyai hak untuk amandemen konstitusi (Dalam hal ini militer mempunyai hak veto untuk perubahan amandemen, karena merupakan anggota mayoritas
Yudikatif	Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan yang keputusannya bersifat final dan juga mengikat	Setelah tahun 2012, terdapat perubahan amandemen sehingga keputusan konstitusi hanya bersifat deklaratif, tidak lagi final dan mengikat. Dimana keputusan pengadilan konstitusi dapat ditinjau kembali oleh legislatif.

Tabel diatas merupakan perbedaan antara Indonesia dan Myanmar dalam penyelenggaraan administrasi di kedua negaranya. Perbedaan ini didasarkan pada Konstitusi Myanmar 2008. Perbedaan ini pun tidak sesuai dengan kondisi realita yang ada di Myanmar dikarenakan pada saat ini pemerintahan sepenuhnya berada di kekuasaan militer setelah terjadi kudeta pada 1 Februari. Pemerintahan yang saat ini sepenuhnya berada dalam tangan kekuasaan militer menyebabkan kekosongan hukum karena konstitusi tidak dijalankan sebagaimana harusnya. Bahkan beberapa pihak memprediksi terkait kemunculan suatu piagam baru yang

¹⁸ Sahya Anggara, *Perbandingan Administrasi Negara*, Cet 1 (Bandung:Pustaka Setia:2012), hal.79.

akan dikeluarkan oleh militer dalam hal pelaksanaan fungsinya dalam pemerintahan.

Perbandingan administrasi yang dilakukan terhadap Indonesia dan Myanmar telah menunjukkan seberapa besar perbedaan dan persamaan antara administrasi yang dijalankan oleh kedua negara. Konstitusi, tujuan nasional, sosial-budaya, hingga sejarah menjadi alasan mengapa administrasi negara dapat berbeda-beda. Namun dalam perbedaan tersebut, pada dasarnya setiap negara beserta rakyat didalamnya ingin mencapai tujuan dasar yang sama, yakni kesejahteraan manusia.

Daftar Pustaka

- Adlina, Miza Nina. *dkk.* "METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA", dalam *Jurnal Edumaspul* Volume 6 Nomor 1, (2022): 974-980.
- Alvela. *dkk.* "Dampak Prinsip-Prinsip Dasar ASEAN Terhadap Pola Kerjasama ASEAN Menghadapi Krisis Kudeta Myanmar", dalam *Nation State: Journal of International Studies* Volume 4 Nomor 1, (2021): 117-139.
- Ambarwati, Ambarwati. "Sikap Asean Terhadap Pelanggaran Ham Di Myanmar Pasca Kudeta", dalam *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Volume 6 Nomor 1, (2022): 20–36.
- Anggara, Sahya. *Perbandingan Administrasi Negara*, cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Argawati, Utami. *Sistem Peradilan Myanmar Pasca Kudeta*, diakses pada 20 April 2024, dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18856>.
- Artharini, Nadia Feby. "PERBANDINGAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT NEGARA MYANMAR DENGAN INDONESIA", dalam *Tanjungpura Law Journal* Volume 5 Nomor 2, (2021): 214-247.
- Ashadi, Willi. "KUDETA JUNTA MILITER MYANMAR TERHADAP AUNG SAN SUU KYI 2021", dalam *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs* Volume 7 No 2 (2022): 138–164.
- Dakota Ilmu (2023, 5 April). *Sistem Administrasi Negara Indonesia* [Video]. Youtube. <https://youtu.be/OkCeqGyPA9o?si=uwiY3vJj1bOpg5NX>
- Djirimu, M. A. *dkk.* "Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia di ASEAN Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing", dalam *Kajian Ekonomi dan Keuangan* Volume 4 Nomor 3, (2021): 195-215.
- Faustina Ivana, S. D. J., Euneke Dewi, T., & Fiki Rahmatina, N. Kudeta Myanmar: Junta Militer Di Era Modern. *Jurnal Pena Wimaya* Volume 1 No 2, (2021): 43-58.
- Firnas, M. Adian. "Prospek Demokrasi di Myanmar", dalam *Jurnal Paramadina* Volume 2 Nomor 2, (2003): 128-141.

- Indrawan, Jerry, & Ilmar, Anwar. “Kehadiran media baru (new media) dalam proses komunikasi politik”, dalam *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi* Volume 8 No 1, (2020):1–17.
- Iqbal, Muhamad Firdaus., dan Indah Dwiprigitaningtias. “Kudeta Militer Myanmar dalam Perspektif Hukum Internasional”, dalam *Jurnal Dialektika Hukum* Volume 3 Nomor 1, (2021): 113-129.
- Kusumah, Ari. “Memahami Administrasi Negara melalui Perspektif Perbandingan”, dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Volume 4 Nomor 4, (2023): 589-592.
- Laksono, Totok Minto dan Florensia Devina. “Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia Dengan Sistem Administrasi Negara China”, dalam *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan* Volume 8 Nomor 6, (2023): 56-67.
- Maulida, Anisa Syifa. *dkk.* “Analisis Perbandingan Administrasi Publik Negara Inggris dan Australia”, dalam *PENTAHHELIX: Jurnal Administrasi Publik* Volume 1 Nomor 2, (2023): 163-174.
- Muliati. “Administrasi Negara dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia”, dalam *Meraja Journal* Volume 2 Nomor 1, (2019): 83-92.
- Nurdin, Ismail. *Etika Pemerintahan; Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan*, cet. 1. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Pelu, Handika. D.A. *dkk.* “PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIANUT OLEH NEGARA KESATUAN REPUBILK INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN”, dalam *Jurnal Cahaya Keadilan* Volume 10 Nomor 1, (2022): 22-35.
- Rahim, Abdur. *dkk.* “Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia”, dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Volume 6 Nomor 8, (2023): 5806-5811.
- Sunarso. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”, dalam *Jurnal Alhadharah* Volume 17 Nomor 33, (2018): 81-95.
- Yusuf, M. Aris. *Bentuk Pemerintahan Myanmar Hingga Destinasi Wisata-Nya!*, diakses pada 20 April 2024, dari <https://www.gramedia.com/literasi/oligarki/>.

